

BAB I
PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar belakang masalah

Pendidikan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan yang memainkan peranan penting. Pentingnya peranan tersebut dapat ditinjau dari banyak segi. Salah satu segi pandangan ialah bahwa pendidikan tinggi penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan konsep pendidikan sebagai investasi manusia. Dari sisi pandangan ini, dapat dikaji berapa besar kontribusi pendidikan tinggi dalam usaha menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang berperan dalam menghadapi berbagai kegiatan pencapaian tingkat kesejahteraan manusia. Pendidikan tinggi diharapkan dapat berperan untuk menjadi lembaga penghasil tenaga-tenaga yang potensial dan mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada pihak lain, peranan dan fungsi pendidikan tinggi sangat dirasakan pentingnya, terutama dalam kaitannya dengan adanya perkembangan dan penemuan-penemuan baru. Dari sisi ini, pendidikan tinggi diharapkan dapat berperan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada khususnya, dan kebudayaan pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan tinggi hendaknya menjadi pelopor dalam usaha-usaha penemuan baru serta mendesiminasikan hasil penemuan

penemuan baru tersebut untuk dapat terpakai bagi usaha men-
sejahterakan umat manusia.

Peranan dan fungsi Pendidikan Tinggi yang demikian
besar itu mengharuskan adanya perhatian yang besar untuk pe-
ngelolaan dan pembinaan yang terarah dan sistematis. Salah
satu usaha yang dapat ditempuh ialah melalui pelaksanaan pe-
rencanaan -- khususnya perencanaan pendidikan -- yang mema-
dai. Pentingnya perencanaan pendidikan itu diperhatikan, ter-
utama dalam menunjang peningkatan produktivitas, efisiensi
dan relevansi program-program dan kegiatan pendidikan dalam
kaitannya dengan pertumbuhan kebutuhan yang ada. Dalam hu-
bungan ini, Banghart dan Albert mengemukakan bahwa "kebutu-
han akan perencanaan meningkat searah dengan semakin kom-
pleksnya masyarakat teknologi modern"¹ Hal tersebut berla-
ku untuk Pendidikan Tinggi, karena pentingnya perencanaan
pendidikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh
semakin kompleksnya kehidupan masyarakat modern yang hidup
dalam abad teknologi modern pula.

Untuk dapat melaksanakan perencanaan yang baik, di-
perlukan berbagai upaya untuk memahami konsep-konsep perem-
canaan di antaranya pemahaman tentang model dan metoda pe-
rencanaan yang digunakan. Secara teoritik, terdapat banyak

¹F.W. Banghart, A. Trull, Educational Planning, The
Macmillan Company, New York, 1973, hal. 5.

model dan metoda perencanaan yang dikemukakan para ahli. Namun demikian perlu diingat bahwa diperlukan adanya selektivitas terhadap berbagai model dan metoda perencanaan dengan menyesuaikan pada kondisi-kondisi dan situasi-situasi dimana perencanaan tersebut akan dilaksanakan. Hal ini erat kaitannya dengan pandangan bahwa Pendidikan Tinggi merupakan suatu sistem terbuka. Sebagai sistem terbuka, Pendidikan Tinggi tersebut mempunyai karakteristik adanya saling pengaruh dengan lingkungannya. Keadaan demikian akan menciptakan berbagai kondisi dan situasi yang tidak boleh diabaikan untuk kepentingan perencanaan, terutama dalam penerapan model-model dan metoda-metoda perencanaan pendidikan. Keterbukaan sistem pendidikan tinggi menuntut para perencana untuk memperhitungkan bagaimana lingkungan pendidikan tersebut dipengaruhi maupun mempengaruhi berbagai komponen dalam sistem tersebut.

Perencanaan pendidikan yang dilaksanakan dalam dunia Pendidikan Tinggi tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan yang hendak dicapai. Dewasa ini, arah kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia terutama menyangkut dua hal, yaitu (1) Pengembangan sistem pendidikan tinggi, dan (2) Perbaikan sistem Pendidikan Tinggi. Arah kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dijumpai oleh perencanaan pendidikan dengan menggunakan model-model dan metoda yang sesuai. Dalam hubungan dengan adanya berbagai model dan metoda peren-

canaan pendidikan, terdapat suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu mengenai proses yang terdapat dalam setiap model dan metoda tersebut. Setiap model dan metoda perencanaan mempunyai proses yang spesifik. Proses tersebut dilandasi oleh konsep-konsep tertentu. Oleh karena itu dalam praktek perencanaan yang diterapkan dengan menggunakan model dan metoda tertentu perlu dianalisis / dievaluasi mengenai proses yang berlangsung. Dari hasil analisis dan evaluasi tersebut, dapat ditemukan atau diketahui sampai berapa jauh model-model dan metoda itu cocok untuk dikembangkan dalam usaha-usaha perbaikan dan pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada lembaga-lembaga pendidikan yang menerapkannya.

Salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia yang berusaha untuk mengadakan usaha-usaha perbaikan dan pengembangan sistemnya dengan menerapkan model dan metoda perencanaan tertentu ialah IKIP. IKIP sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, mempunyai kedudukan dan misi yang spesifik. Hal ini disebabkan karena IKIP tidak saja dihadapkan pada peranan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kependidikan, tetapi sekaligus berperan dalam menghasilkan tenaga-tenaga profesional kependidikan yang akan mempunyai andil besar dalam mencerdaskan dan menrampilkan kehidupan Bangsa Indonesia.

Peranan spesifik sebagai penghasil tenaga- tenaga kependidikan akan memberi warna tersendiri terhadap perencanaan pendidikan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena masalah yang berhubungan dengan tenaga - tenaga profesional kependidikan tidak saja berkenaan dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif, tetapi juga hal-hal yang bersifat kualitatif. Dalam hubungannya dengan proses perencanaan pendidikan pada IKIP, hal tersebut mempunyai implikasinya yang penting untuk diperhatikan.

Masalah spesifik pada IKIP tersebut, mengisyaratkan suatu pertimbangan yang serius terhadap para perencana. Apalagi kalau dikaitkan dengan suatu pandangan bahwa spesifikasi yang ada pada IKIP itu bukanlah sesuatu yang bersifat "sementara" tetapi sesuatu yang berkelanjutan. Sebab itu kontinuitas dalam perencanaan pendidikan -- khususnya pada IKIP -- senantiasa diperlukan dengan mempertimbangkan berbagai perubahan akibat kondisi dan situasi yang ada. Pandangan ini menggambarkan bahwa dalam melaksanakan perencanaan pendidikan pada IKIP, diperlukan tenaga-tenaga profesional di bidang perencanaan yang mempunyai latar belakang pengetahuan tentang pendidikan. Perlunya latar belakang pendidikan yang perlu dipahami didasarkan pada pemikiran bahwa dalam perencanaan pendidikan diperlukan pemahaman mengenai spesifikasi kependidikan (educational specification). Spesifikasi kependidikan dalam perencanaan pendidikan dapat dipandang sebagai aspek vital dan

pangkal bertolak dari proses perencanaan pendidikan.

Dengan perencanaan pendidikan, diharapkan dapat menunjang terjadinya kontinuitas pembangunan pada IKIP. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai usaha yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan pendidikan pada dasarnya merupakan usaha-usaha yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa apa yang dicapai pada tahap tertentu merupakan suatu prakondisi bagi kegiatan-kegiatan pembangunan tahap berikutnya. Semuanya ini diarahkan pada usaha pencapaian tujuan yang diinginkan untuk dijangkau. Berbagai kegiatan dalam pencapaian tujuan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Dalam hubungan inilah diperlukan diadakannya perencanaan yang mantap. Karena dengan adanya perencanaan pendidikan yang dilaksanakan dengan baik, akan menggambarkan kaitan antara berbagai kegiatan yang dilaksanakan menurut tahapan-tahapan yang diinginkan. Dengan kata lain, perencanaan pendidikan itu dapat menjadi pedoman tentang arah kesinambungan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dalam strategi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia sekarang ini, oleh pihak yang berkompeten telah dicoba untuk menerapkan suatu model perencanaan pendidikan tinggi yang dikenal dengan Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4). Pemilihan model ini untuk diterapkan dalam perencanaan pendidikan tinggi, antara lain didasarkan pada asumsi utama bahwa sistem ini

dapat menjamin kontinuitas dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan tinggi. Namun demikian, dalam praktek perencanaan ditemukan adanya hambatan-hambatan sehingga apa yang diharapkan untuk diberlakukan dalam proses perencanaan tersebut sering tidak terlaksana.

Penelitian ini diusahakan untuk mengadakan penilaian terhadap sistem perencanaan yang menggunakan model SP4 tersebut, terutama prosesnya. Proses yang dimaksudkan adalah yang ada pada tingkat lembaga dalam hal ini IKIP. Proses perencanaan dengan menggunakan model ini sangat perlu untuk ditelaah karena proses tersebut dapat menggambarkan bagaimana rangkaian kegiatan dalam menjabarkan kegiatan-kegiatan yang diformulasikan dalam struktur program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan dan pengembangan sistem IKIP sebagai lembaga pendidikan tinggi. Juga berbagai kegiatan perencanaan sehubungan dengan proses SP4 pada tingkat IKIP banyak tergantung pada tingkat kemampuan para perencana yang diserahkan tanggung jawab merencanakan program-program.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memusatkan pada suatu kasus perencanaan pada IKIP Manado. Secara khusus terdapat beberapa kenyataan yang berhubungan dengan praktek perencanaan pendidikan pada IKIP Manado dalam menerapkan SP4. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dikemukakan dalam uraian berikut ini.

Sebagaimana dimaklumi bahwa SP4 sebagai salah sa-

lah satu model perencanaan yang mengacu pada konsep-konsep "Planning Programming Budgeting Systems" (PPBS) baru mulai diterapkan khususnya pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Demikian pula halnya pada IKIP Manado sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Pada kenyataannya, maka pelaksana perencanaan dalam menerapkan SP4 ditangani oleh satu "satuan tugas" (task-force) yang cenderung bersifat sementara (temporer). Keadaan demikian dapat mempengaruhi karakteristik utama SP4 sebagai suatu aktivitas perencanaan yang berkesinambungan dan berdasarkan pada rencana yang menggelinding (rolling plan)

Di samping itu terdapat pula kenyataan bahwa dalam pelaksanaannya sering terdapat keterbatasan dalam mengikutsertakan pihak-pihak yang sebenarnya mempunyai kompetensi dalam perencanaan pendidikan pada IKIP Manado. Hal tersebut merupakan suatu tantangan dalam penerapan perencanaan pendidikan yang hendak mempertemukan prinsip "perencanaan dari bawah" (bottom-up approach) dengan "perencanaan berdasarkan pengarahannya dari atas" (top-down approach). Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penanganan perencanaan melalui satu satuan tugas (task-force), memungkinkan adanya keterbatasan menyangkut "perencanaan partisipatif" dalam proses yang ditempuh. Terdapat kecenderungan bahwa keseimbangan antara pengarahannya dan otonomi masih terbatas pada pengarahannya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan otonomi yang terbatas pada satuan tugas perencanaan tingkat lem-

baga pendidikan tinggi yang ada. Dengan demikian yang merupakan suatu tantangan ialah penerapan SP4 dengan lebih memperluas jangkauan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam melibatkan lebih banyak pihak yang ada dalam lembaga pendidikan tinggi -- dalam hal ini IKIP Manado -- Hal ini perlu dimaklumi karena struktur porganisasi lembaga pendidikan tinggi mempunyai ciri tersendiri terutama mengenai kompleksitasnya. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme perencanaan partisipatif dalam prosesnya, agar ide yang terkandung dalam SP4 itu benar-benar dapat diwujudkan.

Pada pihak lain, terdapat kenyataan bahwa tenaga perencana yang ada pada IKIP Manado terdapat keterbatasan terutama jika dilihat dari adanya tenaga-tenaga perencana yang benar-benar berkompeten dalam menerapkan SP4 pada IKIP Manado tersebut. Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa mutu rencana atau program yang dihasilkan dari proses perencanaan dan penyusunan program, banyak dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang melaksanakannya. Dalam hubungan ini jelas bahwa tenaga perencana pada IKIP Manado dihadapkan pada adanya keterbatasan terutama dari segi kuantitas orang-orang yang berkualitas sebagai perencana pendidikan yang benar-benar memahami dasar-dasar konseptual SP4 tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan karakteristik SP4 yang pada dasarnya mengacu pada model Perencanaan yang dikemal dengan PPBS tersebut. Model itu

sendiri perlu dipahami agar proses yang ditempuh benar-benar sesuai dengan ide pokok dari model yang diterapkan.

Dalam penerapannya di Indonesia, SP4 itu diharapkan akan menghasilkan program-program acuan untuk suatu kurun waktu tertentu. Hal ini terutama akan dicapai melalui berbagai analisis dalam penyusunan Konsep Program Operasional (KPO), yang bila diteliti, pada dasarnya merupakan suatu mekanisme perencanaan untuk kurun waktu lima tahun, dengan senantiasa mengadakan modifikasi pada setiap tahun perencanaan. Selain adanya Konsep Program Operasional, terdapat pula dokumen lainnya yaitu Usulan Program (UP) yang disusun untuk satu tahun anggaran. Ditinjau dari sifat kedua dokumen SP4 tersebut, maka Usulan Program dapat berperan pula sebagai pangkal penyusunan Konsep Program Operasional (KPO) yang disusun pada tahun perencanaan yang bersamaan, dan pada satu pihak sebenarnya merupakan penjabaran program-program yang telah disusun dalam KPO tahun perencanaan sebelumnya. Baik Konsep Program Operasional maupun Usulan Program kedua-duanya benar-benar dapat dipandang sebagai perwujudan otonomi lembaga dalam perencanaan, karena kedua dokumen SP4 tersebut disusun oleh perencana tingkat lembaga untuk selanjutnya diusulkan pada pihak-pihak yang lebih berwenang dalam pengalokasian anggaran pembangunan. Sebagai produk akhir dari kegiatan SP4 ialah Daftar Isian Proyek, yang secara kom-

septual telah merupakan perpaduan antara otonomi lembaga dan pengarahan dari atas. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa DIP tersebut merupakan suatu pembanding untuk menentukan kualitas Konsep Program Operasional (KPO) dan Usulan Program (UP) yang disusun oleh Tim Perencana tingkat lembaga.

Gambaran tentang kualitas Konsep Program Operasional dan Usulan Program sekaligus telah dapat menunjukkan pula kualitas dan fisibilitas program-program yang direncanakan serta diusulkan oleh lembaga. Hal ini disebabkan karena salah satu ciri utama SP4 adalah "program budgeting". Dengan ciri atau karakteristik ini, jelas bahwa tingkat fisibilitas program akan besar sekali manfaatnya untuk mendapatkan persetujuan terhadap anggaran yang direndanakan dan diusulkan.

Kenyataan-kenyataan yang telah dikemukakan perlu untuk dikaji melalui berbagai usaha, terutama dengan mengadakan penelitian-penelitian terhadap model tersebut. Salah satu usaha penelitian yang dapat dilaksanakan ialah yang bersifat evaluatif, dengan asumsi bahwa model perencanaan yang diteliti itu benar-benar telah dilaksanakan. Dengan hasil penelitian ini, diperoleh informasi yang dapat dikomunikasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pada para pengambil keputusan dalam hubungan dengan perbaikan dan pengembangan lembaga. Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian

evaluatif yang berusaha untuk mempelajari kasus-kasus perencanaan dalam proses perencanaan IKIP Manado dalam usaha penerapan SP4.

2. Rumusan Masalah Penelitian

Masalah yang akan diteliti berhubungan dengan proses pelaksanaan dan penerapan SP4 pada IKIP Manado. Beberapa kegiatan SP4 yang ada pada tingkat lembaga adalah (1) Penyusunan Konsep Program Operasional (KPO) untuk TS (Tahun sekarang) tambah dua (TS + 2) sampai TS + 4, (2) Penyusunan Usulan Program (UP) untuk TS + 1, (3) Penyusunan Daftar Usulan Proyek (DUP), dan (4) Pengisian Daftar Isian Proyek (DIP).

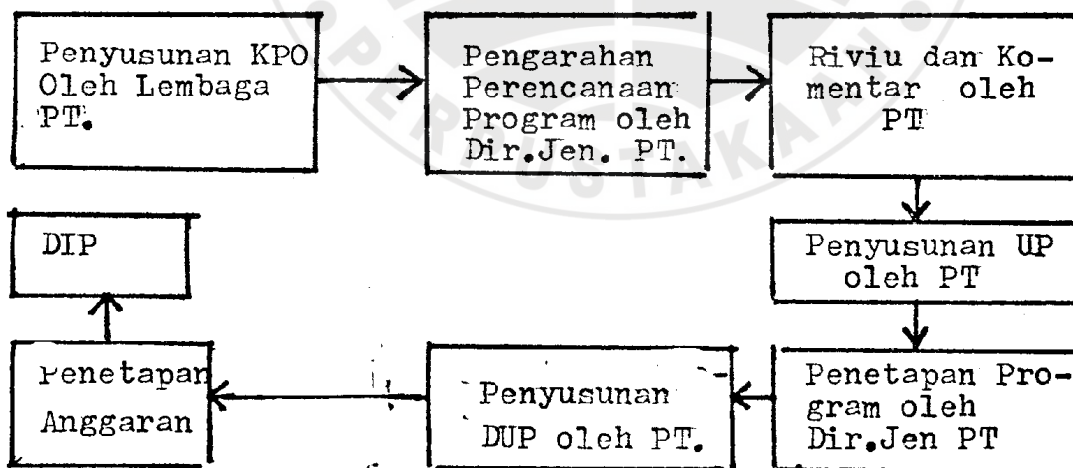
Kegiatan-kegiatan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari ke empat kegiatan yang telah dikemukakan, terdapat dua kegiatan yang dianggap penting dalam proses perencanaan pada tingkat lembaga dan memerlukan kemampuan profesional para perencana. Ini disebabkan karena kedua kegiatan ini dapat merupakan dasar penjabaran berbagai proyek yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran tertentu. Sedangkan pada satu pihak, adanya DIP dapat dipandang sebagai salah satu pembanding bagaimana keberhasilan penyusunan KPO dan UP oleh para perencana pada tingkat lembaga.

Khususnya mengenai Konsep Program Operasional (KPO) dan Usulan Program (UP) terdapat kaitan yang sangat erat sekali. Konsep Program Operasional dapat dijadikan patokan dalam penyusunan program-program yang akan diusulkan

pada Usulan Program (UP) tahun perencanaan berikutnya dan pada satu pihak Usulan Program pada tahun perencanaan bersamaan dapat dijadikan sebagai pangkal tolak untuk menyusun Konsep Program Operasional pada tahun tersebut. Hubungan yang erat ini perlu sekali dikaji karena dapat menggambarkan suatu mekanisme perencanaan yang baik. Dalam kedudukan inilah, baik KPO maupun UP dipandang sebagai unsur-unsur sistem informasi yang sangat diperlukan untuk pemilihan program-program alternatif.

Penelaahan terhadap DIP dalam hubungannya dengan UP dan KPO akan sangat membantu memberikan gambaran sejauh mana KPO dan UP dapat berperan terutama untuk meyakinkan para pengalokasi dana untuk memberikan persetujuan.

Permasalahan penelitian ini diangkat dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan SP4. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dalam pola berikut ini.



Penelitian hanya ditujukan untuk mengevaluasi kegiatan penyusunan KPO, UP serta DIP yang disetujui setiap tahun anggaran. Pemilihan fokus penelitian terhadap tiga komponen SP4 ini didasarkan pada rationale sebagai berikut.

KPO dan UP dapat dipandang sebagai dua dokumen SP4 yang menggambarkan rumusan-rumusan yang diperoleh berdasarkan analisis kebutuhan dan tuntutan yang berkembang dalam lembaga itu sendiri, sehingga diharapkan dapat merupakan suatu representasi otonomi lembaga dalam perencanaan. Sedangkan pada satu pihak perlunya mengevaluasi DIP, didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam DIP dapat ditemukan gambaran keseimbangan antara otonomi dan pengarahan dari atas.

Dengan hanya melihat KPO, UP dan DIP, penelitian ini hanya membatasi tiga aspek, yaitu (1) Reliabilitas prediksi dalam KPO, (2) Kontinuitas perencanaan dengan melihat rumusan permasalahan, jumlah dan jenis program, (3) Konkordansi (kesesuaian) antara yang diusulkan dalam UP dan yang disetujui dalam DIP. Untuk jelasnya, masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi reliabilitas hasil prediksi dalam KPO selama tahun perencanaan 1979 sampai 1982 ?
- b. Bagaimana kondisi kontinuitas perencanaan dilihat dari rumusan masalah, jumlah dan jenis program yang dijabarkan ?
- c. Bagaimana kondisi konkordansi antara UP dan DIP dilihat dari segi biaya yang diusulkan dalam UP dan yang disetujui dalam DIP ?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelaksanaan SP4 oleh para perencana pada tingkat IKIP Manado dalam menjabarkan rencana-rencana strategik perbaikan dan pengembangan IKIP Manado.

2. Tujuan khusus

Penelitian ini berusaha untuk mengadakan evaluasi terhadap proses perencanaan pada IKIP Manado dengan memfokuskan pada tiga aspek penting, yaitu:

- a. Reliabilitas hasil prediksi dalam KPO.
- b. Kontinuitas perencanaan dengan merujuk pada perumusan permasalahan dalam KPO selang tahun 1979 sampai 1982.
- c. Konkordansi dalam perencanaan dengan membandingkan besarnya biaya yang diusulkan dalam UP dan yang disetujui dalam DIP.

C. Pentingnya penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan, penelitian ini bersifat penelitian evaluatif dengan sasarannya ialah proses pelaksanaan SP4 pada IKIP Manado. Masalah ini penting untuk diteliti karena berkaitan erat dengan usaha-usaha pengelolaan dan pembinaan lembaga pendidikan tinggi -- dalam hal ini IKIP Manado. Dengan mengadakan studi evaluatif, memungkinkan diperoleh bahan-bahan umpan balik yang dapat digunakan untuk mengadakan modifikasi kembali terhadap mo-

del SP4 agar lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Secara lebih khusus, masalah ini penting untuk diteliti, ditinjau dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek praktis operasional

Dilihat dari aspek ini, masalah yang diteliti dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi penerapan SP4 pada tingkat lembaga, oleh para perencananya. Dari gambaran tersebut diharapkan dapat diperoleh cara-cara yang lebih cocok dalam meningkatkan proses pelaksanaannya agar benar-benar program-program yang menunjang arah kebijakan pengembangan IKIP sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dapat dijabarkan secara lebih terarah dan sistemik.

2. Aspek Teoritik.

Dilihat dari aspek ini, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menguji keberlakuan teori-teori perencanaan, khususnya yang diterapkan dalam SP4, terutama teori-teori dan pendekatan sistem dalam manajemen pendidikan.

Baik aspek teoritik maupun praktis operasional dapat dipandang sebagai aspek-aspek penting yang perlu dikaji secara ilmiah ke arah keadaan yang menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara produktif, efektif dan efisien.

Pentingnya penelitian ini berhubungan erat pula de-

ngan alasan mengapa masalah ini perlu diteliti, sebagai berikut :

- a. Masalah ini menarik perhatian dan minat penulis untuk menelitinya.
- b. Masalah ini dapat diteliti karena penerapan SP4 pada IKIP Manado telah dilaksanakan sejak beberapa tahun. Dengan demikian, memungkinkan untuk mengadakan suatu studi evaluatif.
- c. Masalah yang diteliti mempunyai kaitan erat dengan latar belakang pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, terutama hal-hal yang menyangkut Administrasi Pendidikan pada umumnya dan perencanaan pendidikan pada khususnya.
- d. Penelitian ini dapat ditunjang oleh sumber-sumber yang tersedia.

